

PEMKAB ABDYA SUSUN RKPD 2024, INI TUJUH PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2024



Dok Humas

Pj Bupati Abdy, H Darmansah SPd MM saat membuka kegiatan forum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 di aula Bappeda setempat, Selasa (31/01/2023)

Laporan Taufik Zass | Aceh Barat Daya

SERAMBINNEWS.COM, BLANGPIDIE - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Pemkab Abdy), mulai melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bappeda setempat ini dibuka langsung oleh Pj Bupati Abdy, H Darmansah S.Pd MM, Selasa (31/01/2023). Pj Bupati Abdy, H Darmansah SPd MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa, agenda dimaksud bertujuan untuk mendapatkan masukan dari semua pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan dari tahap rancangan awal RKPD Abdy tahun 2024 hingga menjadi RKPD Abdy 2024. "Penyusunan RKPD tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mencapai visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 yaitu Abdy yang maju, makmur dan mandiri serta bertaqwa kepada Allah SWT dalam sistem pemerintahan daerah yang bersih, jujur dan berkeadilan," ujarnya.

Dijelaskan Pj Bupati Abdy, arah kebijakan RKPD 2024 merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 yang difokuskan pada pemantapan struktur perekonomian yang berlandaskan keunggulan lokal yang didukung SDM yang berkualitas. Oleh sebab itu, lanjutnya, substansi dari RKPD tahun 2024 merupakan kerberlanjutan dan pembelajaran dari RKPD tahun sebelumnya baik untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan maupun menjadi sarana menjawab berbagai kendala pembangunan yang belum dapat dituntaskan pada periode sebelumnya.

"Akan hal itu, penyusunan RKPD tahun 2024 harus mampu menghasilkan perencanaan yang implementatif melalui beberapa pendekatan seperti pendekatan top down, bottom up, partisipatif, politik dan teknokratik. Dengan demikian diharapkan tujuan pembangunan tahun 2024 dapat tercapai," paparnya. Pada tahun 2024, kata H Darmansah, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan fokus daerah. Pelaksanaan Pemilu Presiden, legislatif dan pemilihan kepala daerah akan berjalan sepanjang tahun. Hal ini disebabkan amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota. "Mengingat peran penting dari RKPD, maka penyusunan evaluasi pembangunan yang digunakan dalam penyusunan RKPD 2024 harus dilakukan secara cermat, terukur dan menyeluruh," jelasnya sembari menegaskan agar dalam penyusunan RKPD Abdy tahun 2024 harus menerapkan pola-pola keterpaduan dalam pembangunan di Abdy,

Hal tersebut, lanjut H Darmansah, dapat dilakukan dengan penyusunan dokumen perencanaan yang baik yang ditandai dengan alur proses perencanaan yang linier antara dokumen daerah dengan dokumen pada tingkat SKPK, sehingga penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Abdy dapat lebih baik pada tahun-tahun berikutnya. "Saya berharap kepada Tim Penyusunan RKPD Abdy dalam penyusunan dokumen ini agar juga menjaga keterpaduan antara prioritas pembangunan Abdy dengan prioritas pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tahun 2024. Sehingga apa yang dicita-citakan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Abdy dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana mestinya," harapnya.

Kepala Bappeda Abdy, Firmansyah ST menyebutkan, ada tujuh program prioritas pembangunan Abdy tahun 2024 diantaranya, peningkatan kualitas SDM, penguatan kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik, penguatan peran UMKM dalam pengembangan produk strategis daerah dan peningkatan daya saing sektor unggulan daerah, penanganan kasus gizi buruk dan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, penyediaan dan penataan infrastruktur dasar pada daerah prioritas pembangunan. "Tujuan penting dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan dan saran penyempurnaan dalam penyusunan dokumen rancangan awal RKPD Abdy tahun 2024. Sehingga apa yang menjadi program prioritas dapat terealisasi hendaknya," pungkasnya. Kegiatan ini dihadiri unsur forum komunikasi pimpinan kabupaten (Forkompimkab), Sekda Salman Alfarisi, para asisten, staf ahli, kepala SKPK hingga unsur terkait lainnya.

Sumber berita:

1. <https://aceh.tribunnews.com/2023/01/31/pemkab-abdy-susun-rkpd-2024-ini-tujuh-program-prioritas-tahun-2024>, Selasa, 31 Januari 2023.
2. <https://orbitdigitaldaily.com/rkpd-2023-disusun-pj-bupati-abdy-minta-tim-cermat-dan-terukur/>, Selasa, 31 Januari 2023.
3. <https://utustoria.com/2023/01/11/penyusunan-rkpd-2024-dimulai-berikut-paparan-program-prioritas-tahun-depan/>, Selasa, 31 Januari 2023.

Catatan:

- ❖ Berdasarkan berita diatas bahwa penyusunan RKPD tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mencapai visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 yaitu Abdyta yang maju, makmur dan mandiri serta bertaqwa kepada Allah SWT dalam sistem pemerintahan daerah yang bersih, jujur dan berkeadilan. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.¹ RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif² dan RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.³
- ❖ Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.⁴ Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.⁵
- ❖ RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan ⁶ Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:⁷
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan:
 - b. penyiapan rancangan rencana kerja;:
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan

¹ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 5 ayat (1)

² Ibid Pasal 5 ayat (2)

³ Ibid Pasal 5 ayat (3)

⁴ Ibid Pasal 7 ayat (1)

⁵ Ibid Pasal 7 ayat (2)

⁶ Ibid Pasal 13 ayat (2)

⁷ Ibid Pasal 9 ayat (2)

Catatan Akhir:

1. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun⁸
2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.⁹
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.¹⁰

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.

⁸ Ibid Pasal 1 Angka 1

⁹ Ibid Pasal 1 Angka 2

¹⁰ Ibid Pasal 1 Angka 3